

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seperti negara lainnya Indonesia juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (1996) Pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Dengan adanya pembangunan ekonomi yang baik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari adanya perubahan yang terjadi pada taraf hidup masyarakat. Namun, suatu wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu juga memiliki pembangunan ekonomi yang bagus. Hal ini terjadi karena pemerintah hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan tanpa melihat adanya dampak lain yakni ketidakmerataan dalam pembangunan.

(Dwiwahju, 2016) terdapat empat faktor yang mempengaruhi hasil pembangunan daerah yaitu adanya perbedaan potensi daerah, keterlibatan

*stakeholder* (masyarakat, pengusaha domestik, dan investor), perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan sisi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi daerah.

Pertama dari sisi potensi daerah, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam maupun non sumber daya alam yang berbeda dan itu bisa menjadi keuntungan kompetitif. Daerah yang memiliki sumber daya yang berlimpah akan relatif lebih untung karena memiliki keuntungan untuk bisa memanfaatkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi keterlibatan *stakeholder* (masyarakat, pengusaha domestik, dan investor) tentu saja akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Adanya keterlibatan *stakeholder* yang dapat menciptakan kondisi iklim investasi yang kondusif akan mengundang investor untuk mengembangkan sektor ekonomi yang paling menguntungkan di suatu wilayah dan hal ini membawa dampak baik bagi pembangunan di daerah.

Yang ketiga ada dari sisi sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan merupakan modal dasar yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dan sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia rendah akan menjadi beban dan menghambat pembangunan.

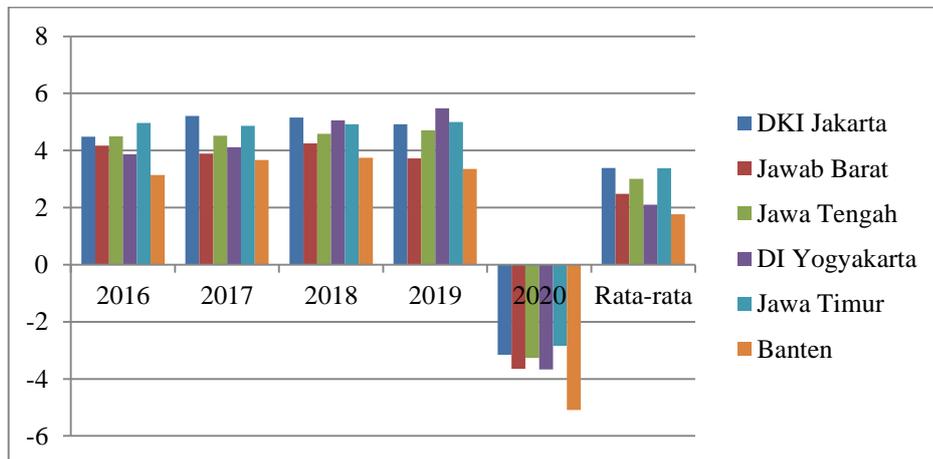
Dari sisi kemampuan pemerintah daerah, pemerintah yang dapat menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif sangat diperlukan dalam mengelola daerahnya dan tentu lebih mampu membangun perekonomian daerahnya daripada

pemerintah daerah yang hanya mengandalkan dana perimbangan pemerintah pusat dan menggunakan cara lama untuk membangun perekonomian. Daerah yang tidak dapat menciptakan kondisi tersebut tentunya mengalami keterlambatan untuk membangun perekonomian dibandingkan dengan daerah yang secara progresif membangun unsur tersebut.

Masalah yang timbul apabila serangkaian upaya tersebut tidak terwujud adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah terbelakang atau tidak maju. Negara maju juga mengalami hal yang sama walaupun tingkat ketimpangannya berbeda. Maka dari itu, tidak mengherankan jika pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah yang relatif maju dan terbelakang. (Angelia, 2010) Salah satu dampak positif yang terjadi adalah pada saat terjadinya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk ikut bersaing agar daerah tersebut tidak tertinggal dengan daerah lain. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004).

Dalam Sjafrizal (2012) Douglas C. North berpendapat bahwa pada tahap awal proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah mencapai titik maksimum dan proses pembangunan dilanjutkan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah akan menurun dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena pada awal proses pembangunan, peluang ini dimanfaatkan oleh daerah yang sudah berkembang lebih baik. Sedangkan daerah yang masih

terbelakang belum mampu memanfaatkan peluang pembangunan tersebut, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah meningkat.



**Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2020 (%)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (diolah)*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita setiap provinsi yang berada di Pulau Jawa mengalami tren yang positif kecuali tahun 2020 dimana semua provinsi mengalami tren negatif dikarenakan pandemi Covid-19. Selama lima tahun terakhir provinsi yang memiliki rata-rata tertinggi sebesar 3,39% adalah DKI Jakarta yang merupakan Ibu kota dimana pusat kegiatan bisnis dan pusat pemerintahan yang berdampak pada Laju Pertumbuhan PDRB per kapita. Kemudian diposisi kedua ada Provinsi Jawa Timur sebesar 3,38%, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 3,01%, setelah itu ada Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata 2,48%, kemudian Provinsi DI Yogyakarta 2,10%, dan terakhir ada Provinsi Banten dengan rata-rata 1,77%.

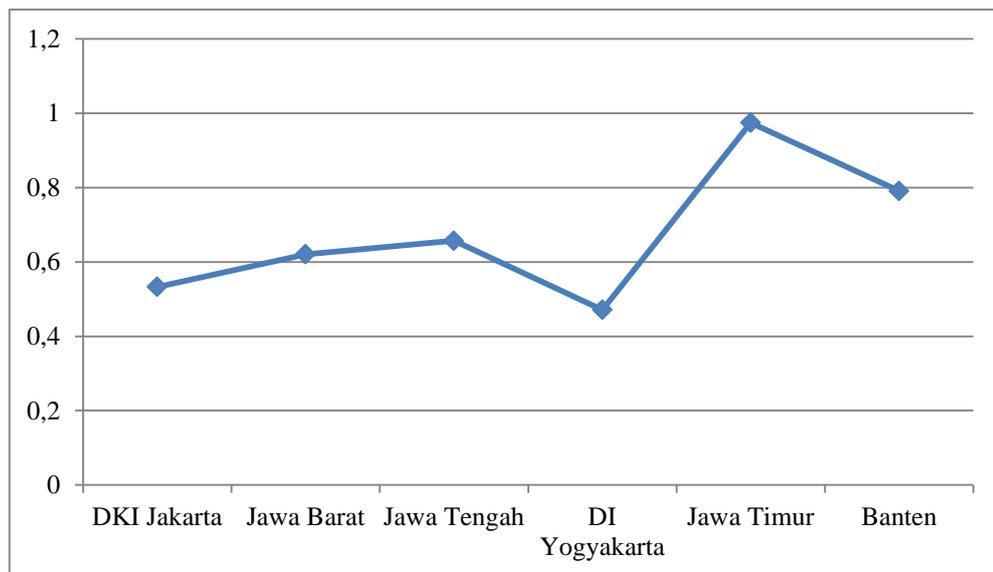
Banten merupakan Provinsi yang terletak paling barat di Pulau Jawa yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten dibentuk

berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober tahun 2000. Mengikuti hasil pemekaran tahun 2000, saat ini Provinsi Banten memiliki 8 daerah administrasi yaitu terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota dan Kota Serang dipilih sebagai Ibukota Provinsi. Keempat kabupaten tersebut adalah Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Serang, sedangkan keempat kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan.

Provinsi Banten merupakan pintu dan lintasan manusia serta barang antara Jawa dan Sumatera, selain itu Banten juga merupakan pintu gerbang masuk Indonesia lewat udara. Lalu lintas daratnya yang menghubungkan Jawa dan Sumatera dipadati kendaraan setiap harinya. Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta juga berada di Provinsi Banten. Selain itu juga terdapat Pelabuhan laut Internasional Bojonegoro yang melengkapi kesibukan Banten sebagai pusat industri dan perdagangan. Potensi pelabuhannya bernilai tinggi yang dapat memberikan artikulasi bagi wilayah tersebut. Banten memiliki potensi industri dan pariwisata. Tetapi, Banten masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, salah satunya adalah ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, kesenjangan wilayah merupakan salah satu isu strategis yang saat ini masih harus ditangani (Bappeda Banten). Hal ini terlihat dari Indeks Williamson Banten yang masih menunjukkan nilai indeks yang tinggi hampir mendekati satu. Sehingga, Provinsi Banten masih belum menunjukkan adanya pemerataan antar wilayah. Selain itu, hal ini juga terlihat dari adanya perbedaan pembangunan antara daerah Banten yang dekat dengan Ibu Kota dan daerah Banten yang berada di pedalaman. Pembangunan

daerah Banten yang dekat dengan Ibu kota seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.



**Gambar 1. 2 Indeks Williamson di Pulau Jawa Tahun 2020**

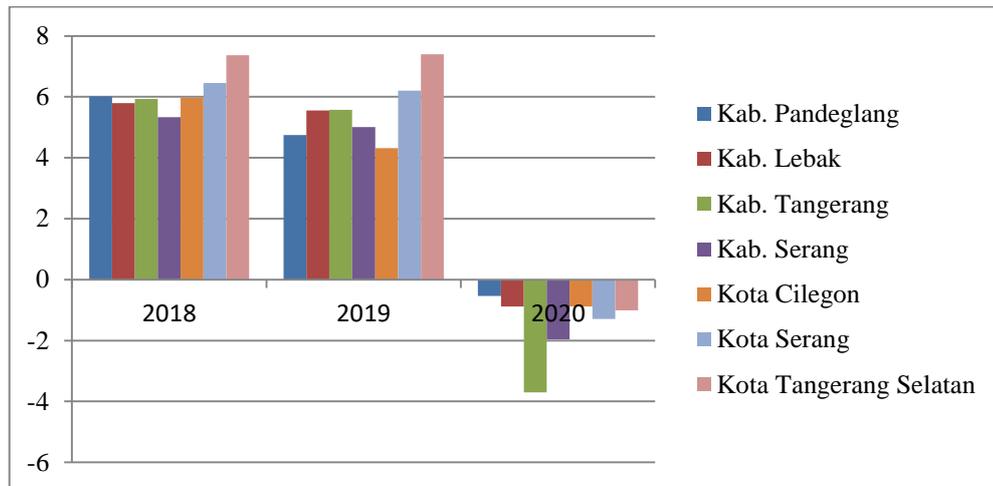
*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*

Karakteristik wilayah yang berbeda-beda merupakan salah satu yang menyebabkan ketimpangan pembangunan. Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki nilai Indeks Williamson sebesar 0,791 menempati posisi kedua setelah Provinsi Jawa Timur dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,974. Kemudian ada Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,657. Provinsi Jawa Barat berada di posisi keempat dengan nilai 0,62. Di posisi kelima terdapat Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,533. Dan terakhir Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,471.

Tingkat ketimpangan di Provinsi Banten tergolong tinggi karena nilainya melebihi 0,5 bila dihitung menggunakan Indeks Williamson. Ketimpangan pembangunan antar daerah yang cukup tinggi salah satunya disebabkan karena konsentrasi kegiatan ekonomi yang tidak merata. Begitu juga di Provinsi Banten dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi. Wilayah Banten Utara yang memiliki basis ekonomi di sektor industri pengolahan dan wilayah Banten Selatan yang memiliki basis ekonomi di bidang pertanian. Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi Banten tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 33,45 persen dari total PDRB Banten, sedangkan sektor pertanian menyumbang 5,73 persen.

Untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator tersebut bermanfaat sebagai alat untuk membandingkan tingkat pembangunan antar daerah sehingga dapat diketahui corak pembangunan di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kata “perkapita” menunjukkan ada dua sisi yang diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah.



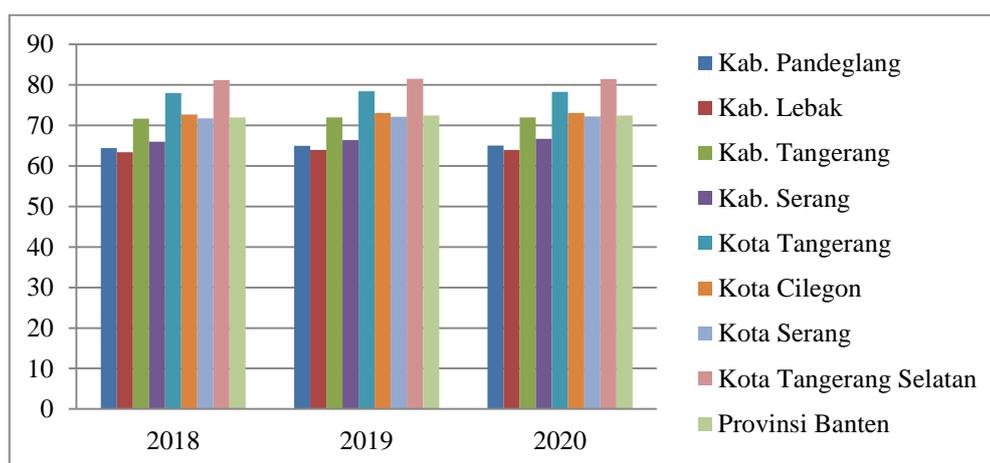
**Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2020 (%)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*

Dapat dilihat dari gambar 1.3 ekonomi Banten pada tahun 2020 mengalami tekanan berat karena ekonomi global mengalami resesi akibat terdampak pandemi Covid-19. Semua wilayah di Provinsi Banten mengalami tren negatif dengan Kota Tangerang menjadi daerah paling terdampak pandemi Covid-19 pada 2020. Ini terlihat dari kontraksi ekonomi Kota Tangerang yang paling dalam di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten sebesar -6,92%, kemudian ada Kabupaten Tangerang dengan nilai pertumbuhan ekonomi -3,7%, Kabupaten Serang menempati urutan ketiga dengan nilai -1,96%, selanjutnya Kota Serang -1,29%, Kota Tangerang Selatan dengan nilai pertumbuhan ekonomi -1,01%, kontraksi ekonomi di Kabupaten Lebak mencapai -0,88%. Sementara itu kontraksi ekonomi yang dialami Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang masing-masing sebesar -0,88% dan -0,54%.

Salah satu yang mempengaruhi ketimpangan adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang biasa diukur menggunakan IPM. Tinggi rendahnya IPM akan

mempengaruhi tingkat produktifitas penduduk. Semakin tinggi IPM maka akan meningkatkan produktifitas penduduk dan hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan penduduk. Tetapi, nilai IPM berbeda-beda di setiap daerah, hal ini yang dapat mengakibatkan ketimpangan antar wilayah.



**Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2020 (%)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*

Pembangunan manusia Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan dilihat dari meningkatnya IPM. Pada tahun 2020 IPM Banten tercatat sebesar 72,45 meningkat sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 status IPM Banten termasuk dalam kategori “tinggi” yang sudah diraih Banten sejak tahun 2015. Akan tetapi meningkatnya IPM Banten hanya terjadi di lima wilayah, masih ada tiga wilayah yang nilainya kurang dari 70 sampai dengan tahun 2020 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan nilai IPM sebesar (65), Kabupaten Lebak (63,91), dan Kabupaten Serang (66,71). Lima Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki nilai diatas 70 adalah Kabupaten Tangerang (71,92), Kota Cilegon (73,05), Kota Serang (72,16), Kota Tangerang (78,25), dan Kota

Tangerang Selatan (81,36). Untuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai masing-masing sebesar (78,43) dan (81,48).

(Indris, Kamal, 2014) Menurut Adelman dan Morris (2004) pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah angka jumlah penduduk dan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, jumlah penduduk yang tinggi meski bukan penyebab utama keterbelakangan, merupakan faktor yang turut berkontribusi terhadap lambatnya pembangunan ekonomi di negara tertentu maupun di suatu wilayah.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2020 (Jiwa)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kab. Pandeglang	1.209.011	1.211.909	1.272.687
Kab. Lebak	1.295.810	1.302.608	1.386.793
Kab. Tangerang	3.692.693	3.800.787	3.245.619
Kab. Serang	1.501.501	1.508.397	1.622.630
Kota Tangerang	2.185.304	2.229.901	1.895.486
Kota Cilegon	431.305	437.205	434.896
Kota Serang	677.804	688.603	692.101
Kota Tangerang Selatan	1.696.308	1.747.906	1.354.350

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*

Data pada tabel 1.1 adalah jumlah penduduk yang memasuki usia produktif dan tidak produktif. Berdasarkan data diatas jumlah penduduk terbanyak

ada di Kabupaten Tangerang dengan 3.245.691 jiwa dan jumlah penduduk terendah ada di Kota Cilegon dengan 434.896 jiwa.

Investasi merupakan salah satu faktor yang penting terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Peran serta nonmateril pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan pusat dan daerah. Investasi dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan oleh pihak swasta dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Modal asing merupakan salah satu sumber yang menjadi sasaran pemerintah untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1. 2 Nilai Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)**

Kab/Kota	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	407.310,41	136.424,3	413.678,82
Kab. Lebak	403.900,56	2.197.142,88	3.241.666,83
Kab. Tangerang	21.333.899,49	15.403.423,13	18.500.133,95
Kab. Serang	5.973.613,91	6.856.554,08	7.906.732,82
Kota Tangerang	4.194.682,35	7.970.792,95	8.353.764,76
Kota Cilegon	14.292.247,8	8.414.135,53	18.143.836,3
Kota Serang	7.010.967,08	5.542.621,42	1.519.575,01
Kota Tangerang Selatan	2.906.424,2	2.210.007,41	3.933.533,96

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten (diolah)*

Tabel 1.2 menunjukkan nilai investasi hasil dari penjumlahan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi Banten. Selama tiga tahun terakhir realisasi investasi tertinggi diperoleh

Kabupaten Tangerang. Kabupaten Lebak memiliki realisasi investasi terendah pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019, dan 2020 Kabupaten Pandeglang yang memiliki realisasi investasi terendah.

Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Disisi lain seperti yang dikatakan oleh Myrdal dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmarataan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas seberapa besar ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana tipologi daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Maka dari itu peneliti tertarik membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “ Ketimpangan Pembangunan: Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketimpangan di Provinsi Banten?
2. Bagaimana klasifikasi daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan investasi secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan investasi secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan di Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui pengklasifikasian tipologi daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten
3. Untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan investasi secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan investasi secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bisa memberikan wawasan mengenai kondisi ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten.
2. Diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan serta mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah.
3. Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi regional dan ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Tasikmalaya, dengan mengakses website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten melalui situs <https://banten.bps.go.id/> dan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten melalui situs <https://dpmpstsp.bantenprov.go.id/> .

